

Peran Ulama dalam Komunikasi Politik Lokal: Studi Strategi dan Pengaruh Pada Pemilihan Kepala Daerah

Nurul Azizah, Mohammad Armoyu

nurulazizah@ibrahimy.ac.id, marmoyu@ibrahimy.ac.id

Fakultas Dakwah Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstrak

Dukungan moral dan komunikasi politik diranah lokal memiliki kekuatan sangat besar terhadap kemenangan kandidat Kepala Daerah di Tapal Kuda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ulama dalam komunikasi politik lokal, strategi yang digunakan, serta dampaknya terhadap hasil pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di dua wilayah yang memiliki budaya keagamaan kuat, yaitu Kabupaten Probolinggo, Bondowoso, Jember dan Kabupaten Situbondo. Hasil yang ditemukan adalah Endorsement Moral yakni ulama memberikan dukungan secara eksplisit kepada kandidat tertentu, sering kali dengan mengaitkan karakter kandidat dengan nilai-nilai agama. Penyebaran pesan politik melalui ceramah agama, mobilisasi massa, ulama memobilisasi basis pendukungnya untuk hadir dalam kampanye dan menggunakan jaringan keagamaan untuk memperkuat dukungan politik.

Kata kunci: komunikasi politik, politisasi agama, ulama dan legitimasi moral, dinamika politik lokal, kepala daerah.

Abstract

Moral support and political communication in the local area have a huge influence on the victory of Regional Head candidates in Tapal Kuda. This research aims to analyze the role of ulama in local political communication, the strategies used, and their impact on the results of regional head elections. This research uses a qualitative approach with a case study method in two areas that have a strong religious culture, namely Probolinggo, Bondowoso, Jember and Situbondo Regencies. The results found were Moral Endorsement, namely ulama providing explicit support for certain candidates, often by linking the candidate's character to religious values. Dissemination of Political Messages through religious lectures, mass mobilization, ulama mobilize their support base to attend campaigns and use religious networks to strengthen political support.

Keywords: political communication, politicization of religion, ulama and moral legitimacy, local political dynamics, regional heads.

Pendahuluan

Komunikasi politik lokal memainkan peran penting dalam pemilihan kepala daerah, terutama di wilayah-wilayah di

mana budaya dan agama memiliki pengaruh signifikan terhadap preferensi politik masyarakat. Ulama, sebagai tokoh agama yang dihormati, sering kali menjadi aktor penting dalam proses komunikasi

politik ini. Mereka tidak hanya memberikan panduan moral kepada masyarakat tetapi juga menjadi penghubung antara kandidat dan pemilih. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran ulama dalam komunikasi politik lokal, strategi yang digunakan, serta dampaknya terhadap hasil pemilihan kepala daerah. Studi tentang komunikasi politik menyoroti pentingnya aktor lokal, seperti tokoh agama, dalam membentuk opini publik (HS et al., 2021; Pribadi, 2018, 2018). Dalam konteks lokal, ulama sering dianggap memiliki legitimasi moral yang kuat, sehingga pendapat dan dukungan mereka dapat memengaruhi pilihan masyarakat (Chalik, 2016; Hasan, 2015). Menurut (Azizah, 2021; Kontselasi dan Lokal, n.d.; Thohir et al., 2021), peran ulama dalam politik sering kali mencakup pemberian endorsement terhadap kandidat tertentu, penyebaran pesan politik melalui ceramah, dan mobilisasi massa berbasis agama. Namun, hubungan antara agama dan politik juga memiliki tantangan, termasuk risiko politisasi agama dan munculnya konflik kepentingan. Studi ini mencoba menjembatani kesenjangan dalam literatur dengan fokus pada dinamika lokal pemilihan kepala daerah.

Adapun pertanyaan penelitian adalah (1) Bagaimanakah peran ulama dalam komunikasi politik lokal? (2) Strategi-strategi apa sajakah yang digunakan untuk memenangkan kandidat yang diusungnya? (3) Bagaimanakah dampaknya terhadap hasil pemilihan kepala daerah?

Studi Literature

Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah proses pertukaran pesan yang dilakukan oleh aktor-aktor politik dengan tujuan memengaruhi opini publik dan perilaku politik. Menurut (El Adawiyah et al., 2019; Fahmi, 2020; Siswati, 2018), komunikasi politik mencakup penggunaan simbol,

media, dan interaksi sosial untuk mencapai tujuan politik tertentu. Dalam konteks lokal, peran aktor non-pemerintah, seperti tokoh agama dan komunitas, menjadi krusial dalam membentuk opini politik masyarakat. Ulama, sebagai tokoh agama, memiliki legitimasi moral yang memungkinkan mereka untuk menjadi penghubung antara kandidat dan masyarakat. Studi (Yudiantiasa, 2020) menunjukkan bahwa ulama sering kali memanfaatkan posisi mereka untuk memberikan endorsement moral kepada kandidat tertentu, yang dianggap mampu mewakili nilai-nilai agama. Endorsement ini tidak hanya membangun citra kandidat tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik.

Selain itu, penelitian (Arrobi & Nadzifah, 2020; HS et al., 2021; Nurul Aula, 2020) menemukan bahwa ulama sering menggunakan ceramah agama sebagai media untuk menyampaikan pesan politik. Pesan-pesan ini biasanya disisipkan dalam konteks nilai-nilai keagamaan, yang membuatnya lebih mudah diterima oleh audiens. Strategi ini sangat efektif di wilayah dengan tingkat religiusitas tinggi. Namun, terdapat tantangan dalam komunikasi politik berbasis agama. Menurut (Arrobi & Nadzifah, 2020; Azizah, 2020; Thohir et al., 2021), politisasi agama dapat menyebabkan fragmentasi sosial dan konflik antar kelompok. Dalam beberapa kasus, keterlibatan ulama dalam politik juga menimbulkan kritik terkait independensi mereka sebagai tokoh agama.

Dengan demikian, literatur menunjukkan bahwa komunikasi politik berbasis agama memiliki potensi besar dalam membentuk opini publik, tetapi juga memerlukan pendekatan yang hati-hati untuk menghindari dampak negatif.

Ulama dan Legitimasi Moral

Ulama adalah istilah yang merujuk pada para cendekiawan atau tokoh agama Islam yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran agama, hukum syariah, dan tradisi keislaman. Mereka dianggap sebagai penjaga otoritas agama dan sumber panduan moral bagi umat Islam. Menurut (HS et al., 2021; Menchik, 2019; Turmudi, 2006), ulama memiliki posisi strategis dalam masyarakat karena kemampuan mereka untuk menyampaikan ajaran agama dalam bentuk yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Legitimasi moral merujuk pada pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap otoritas seseorang berdasarkan integritas, etika, dan nilai-nilai moral yang dianutnya.

Dalam konteks ulama, legitimasi moral diperoleh melalui konsistensi dalam mengamalkan ajaran agama, komitmen terhadap kepentingan umat, dan keterlibatan dalam isu-isu sosial. Legitimasi ini memungkinkan ulama untuk memengaruhi pandangan dan keputusan masyarakat, termasuk dalam konteks politik. Studi (Husyein, 2015) menunjukkan bahwa legitimasi moral memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pesan yang disampaikan oleh tokoh agama. Ulama yang memiliki legitimasi moral tidak hanya dihormati sebagai pemimpin spiritual tetapi juga dipercaya sebagai penasihat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Hal ini membuat mereka menjadi aktor yang kuat dalam komunikasi politik, khususnya di komunitas yang sangat menghargai nilai-nilai keagamaan.

Politisasi Agama

Politisasi agama mengacu pada proses di mana nilai-nilai, simbol, atau institusi agama digunakan untuk tujuan politik.

Dalam konteks komunikasi politik, politisasi agama sering kali digunakan sebagai strategi untuk menarik dukungan dari kelompok pemilih yang religius. Menurut (Burhani, 2021), politisasi agama dapat terjadi ketika aktor politik memanfaatkan identitas agama untuk menciptakan solidaritas atau membedakan diri dari lawan politik mereka. Namun, politisasi agama memiliki dampak yang kompleks. Di satu sisi, ia dapat meningkatkan partisipasi politik di kalangan kelompok religius. Di sisi lain, ia juga berisiko memecah belah masyarakat, terutama ketika agama digunakan untuk memperkuat sentimen sektarian atau eksklusivitas kelompok. Studi (Natar, 2019; Nurul Aula, 2020; Zamroni, 2018) menunjukkan bahwa politisasi agama sering kali menyebabkan ketegangan sosial, terutama di masyarakat yang heterogen secara agama.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, politisasi agama terlihat dalam kampanye-kampanye yang menggunakan narasi agama untuk menyerang atau mendukung kandidat tertentu. Fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan yang hati-hati dalam mengelola hubungan antara agama dan politik agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Dengan demikian, politisasi agama adalah pedang bermata dua dalam komunikasi politik. Sementara ia dapat menjadi alat yang kuat untuk mobilisasi massa, penggunaannya yang tidak bijaksana dapat merusak kohesi sosial dan mengancam stabilitas politik.

Dinamika Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah

Dinamika politik lokal dalam pemilihan kepala daerah mencakup interaksi antara berbagai aktor politik, termasuk kandidat, partai politik, tokoh masyarakat, dan pemilih. Dalam konteks lokal, faktor-faktor seperti budaya, agama, dan jaringan sosial

memainkan peran penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat. Menurut (Akbar, 2017; Astuti et al., 2019; Azizah & Armoyu, 2019), pemilihan kepala daerah sering kali menjadi arena kompetisi yang intens karena dampaknya yang langsung terhadap distribusi sumber daya lokal dan kebijakan publik.

Faktor utama yang memengaruhi dinamika politik lokal meliputi: (1) Struktur Sosial: Komunitas lokal sering kali terbagi berdasarkan identitas agama, etnis, atau afiliasi politik, yang memengaruhi pola dukungan terhadap kandidat tertentu. (2) Kekuatan Tokoh Lokal: Tokoh masyarakat, termasuk ulama, memiliki pengaruh besar dalam menentukan preferensi politik masyarakat. Endorsement dari tokoh lokal dapat meningkatkan legitimasi kandidat. (3) Isu-Isu Lokal: Pemilih cenderung lebih responsif terhadap isu-isu yang langsung memengaruhi kehidupan mereka, seperti akses terhadap layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan ekonomi.

Strategi Kampanye: Kandidat menggunakan berbagai strategi untuk menjangkau pemilih, termasuk melalui pendekatan personal, penggunaan media sosial, dan mobilisasi komunitas berbasis agama atau etnis. Studi (Astuti et al., 2019; Azahra & Alfirdaus, 2019) menyoroti bahwa keberhasilan kandidat dalam pemilihan kepala daerah sering kali bergantung pada kemampuan mereka untuk membangun koalisi yang luas dan menavigasi kompleksitas dinamika lokal. Namun, dinamika ini juga rentan terhadap praktik politik uang, manipulasi identitas,

dan konflik kepentingan yang dapat merusak integritas proses pemilihan.

Dinamika politik lokal menunjukkan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya dalam merancang strategi politik yang efektif dan inklusif. Dalam konteks ini, peran ulama dan tokoh lokal lainnya menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses politik berjalan secara adil dan demokratis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di dua wilayah yang memiliki budaya keagamaan kuat, yaitu Kabupaten Probolinggo, Bondowoso, Jember dan Kabupaten Situbondo. Data dikumpulkan melalui diskriptif tentang ulama, kandidat kepala daerah, dan pemilih, serta analisis dokumen terkait kampanye politik. Observasi langsung selama masa kampanye juga dilakukan untuk mengamati interaksi antara ulama dan masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan metode triangulasi untuk memastikan validitas temuan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama memainkan peran strategis dalam komunikasi politik lokal melalui tiga pendekatan utama:

Endorsement Moral:

Ulama memberikan dukungan secara eksplisit kepada kandidat tertentu, sering kali dengan mengaitkan karakter kandidat dengan nilai-nilai agama. Dukungan ini memengaruhi pemilih yang percaya pada otoritas moral ulama.

Tabel 1: Endorsment Ulama kepada kandidiat Bupati di Tapal Kuda:

No	Kabupaten	Nama Kandidat	Ulama Pendukung	Pengusung	Keterangan
1	Probolinggo	Mohammad Haris Damanhuri Romly (Bupati) dan Fahmi (Wakil Bupati)	<ol style="list-style-type: none"> 1. KH. Moh. Hasan Mutawakkil 'Alallah, S.H., M.M. yang merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. 2. KH. Muhammad Zuhri Zaini: Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo 	Gerindra	Menang
2	Bondowoso	R.K.H. Abdul Hamid Wahid, S.Ag., M.Ag.	<ol style="list-style-type: none"> 1. KH. Muhammad Zuhri Zaini: Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo 2. KHR Cholil As'ad: Pengasuh Pondok pesantren Wali Songo Situbondo 	PKB	Menang
3	Jember	H. Muhammad Fawait, S.E., M.Sc	<ol style="list-style-type: none"> 1. KH. Mukhiddin Abdus Somad 2. KH. Muzakki Syah Pengasuh Pondok Pesantren Al Qodiri Jember 3. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Chotib Al-Qodiri IV Desa 	Gerindra	Menang

					Wringinagung Kecamatan Jombang Jember	
4	Situbondo	Yusuf Wahyu Prayogo	Rio	1.	KHR. Cholil Asad: Pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo Situbondo	PKB, PPP, dll Menang

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024

Bupati terpilih pada Pilkada Serentak 2024 di 27 November 2024 di Kabupaten Probolinggo yakni Mohammad Haris Damanhuri Romly atau biasa disapa dengan Gus Haris. Lahir pada 27 September 1974, dia berprofesi sebagai Pengusaha dan Politisi dari partai Gerindra dari Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Haris adalah putra pertama dari Almarhum K.H. Damanhuri Romly Tamim dan Ning Sus atau bu Nyai. Hj. Diana Susilowati atau Ning Sus. ia juga keponakan dari K.H. Moh. Hasan Mutawakkil 'Alallah, S.H., M.M. yang merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Probolinggo. berdampingan dengan wakil Bupati terpilih Fahmi Abdul Haq Zaini atau lebih dikenal dengan panggilan Lora Fahmi AHZ (lahir 17 November 1985) adalah seorang Politisi dan Ulama yang berasal dari Pondok Pesantren Nurul Jadid, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

R.K.H. Abdul Hamid Wahid, S.Ag., M.Ag. atau lebih dikenal nama Lora Hamid. (lahir 04 September 1971) terlahir dari pasangan K.H. Abd. Wahid Zaini, S.H. (Alm.) dan Ny. Hj. Zubaidiyah Thoha. dari keluarga Pondok Pesantren Nurul Jadid, Karanganyar, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Sejak kecil beliau telah menempuh pendidikan formal yang religius, hingga kemudian melanjutkan karier sebagai

tenaga pengajar masih di bidang keagamaan. beliau adalah anggota DPR RI periode 2004-2009 dan 2009-2014 dari Partai Kebangkitan Bangsa mewakili Jawa Timur. Ia ditempatkan di Komisi X yang menangani Pendidikan, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan. saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur Indonesia.

H. Muhammad Fawait, S.E., M.Sc. (lahir 8 Februari 1988) adalah Bupati Jember. anak dari pasangan Chodori Chotib dan Masluhah Mansur Chodori, yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Tegalrejo di Kabupaten Magelang. Fawait berpasangan dengan Wakil Bupati terpilih Djoko Susanto berhasil mengalahkan Pertahana/ Incumbent. Gus Fawait juga sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Chotib Al-Qodiri IV Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Jember ini unggul dengan 54,30 persen suara. Sementara Paslon Petahana hanya mendapatkan 45,70 persen dari total pemilih.

Bupati Terpilih Kabupaten Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, S.Sos Tempat, Tanggal Lahir Situbondo, 30 maret 1984. Alamat situbondo, Jawa Timur. Pendidikan Terakhir S1. Rio mendapat diusung oleh Partai kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Golkar, PDIP.

Penyebaran Pesan Politik:

Melalui ceramah agama, ulama menyisipkan pesan-pesan politik yang mendukung kandidat tertentu. Strategi ini efektif dalam menjangkau komunitas yang aktif dalam kegiatan keagamaan.



Gambar: Saat pasangan Gus Haris dan Gus Fahmi Mengadakan Maulid Akbar dihadiri para ulama pendukungnya, 2024.

Mobilisasi Massa:

Ulama memobilisasi basis pendukungnya untuk hadir dalam kampanye dan menggunakan jaringan keagamaan untuk memperkuat dukungan politik.



Gambar: Saat Kiai Kholil As'ad Menghadiri Pengajian dihadiri puluhan ribu jamaah



Gambar: RAHMAD mengadakan pengajian di dukung Ulama dan Tokoh Penting di Bondowoso

Namun, penelitian juga menemukan tantangan, seperti munculnya kritik terhadap ulama yang dianggap terlalu berpihak dan risiko fragmentasi sosial akibat politisasi agama. Dalam beberapa kasus, keterlibatan ulama justru memicu resistensi dari kelompok masyarakat yang tidak sepakat dengan pandangan politik mereka.

Simpulan

Ulama memiliki peran signifikan dalam komunikasi politik lokal, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah. Strategi mereka yang mencakup endorsement moral, penyebaran pesan politik, dan mobilisasi massa terbukti efektif dalam memengaruhi preferensi pemilih. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan antara peran ulama sebagai tokoh agama dan keterlibatan mereka dalam politik untuk menghindari konflik sosial. Penelitian ini merekomendasikan adanya regulasi yang jelas terkait peran tokoh agama dalam politik serta pendidikan politik bagi masyarakat untuk mendorong pemilihan yang lebih rasional dan bebas dari tekanan.

Daftar Pustaka

- Akbar, I. (2017). Pilkada serentak dan geliat dinamika politik dan pemerintahan lokal Indonesia. *CosmoGov*, 2(1), 95. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11852>
- Arrobi, M. Z., & Nadzifah, A. (2020). Otoritas Agama di Era Korona: Dari Fragmentasi Ke Konvergensi? *Maarif*, 15(1), 197–215. <https://doi.org/10.47651/mrf.v15i1.85>
- Astuti, P., Afandi, M. A., & Listyani, R. H. (2019). Kajian Peran dan Partisipasi

- Politik Perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 13.
- Azahra, J. M., & Alfirdaus, L. K. (2019). Politik Familisme di Tubuh Partai Islam Lokal: Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan (Ppp) Kabupaten Rembang. *Journal of Politic and Government*
- Azizah, N. (2020). *DAKWAH DIGITAL : PELUANG DAN TANTANGAN DI ERA*.
- Azizah, N. (2021). Tribalisme, Oligarki Kekuasaan dan Dinamika Politik Kekerabatan Dalam Jaringan Pondok Pesantren. *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, 2(1), 30–45.
<https://doi.org/10.33752/tjiss.v2i1.2211>
- Azizah, N., & Armoyu, M. (2019). Politisasi hijab: kontestasi pemilihan kepala daerah. *HUMANISMA : Journal of Gender Studies*, 03(No 02), 114–128.
<https://doi.org/10.30983/humanisme.v3i2.2412>
- Burhani, A. N. (2021). It's a Jihad: Justifying Violence towards the Ahmadiyya in Indonesia. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 9(1), 99–112.
<https://doi.org/10.1017/trn.2020.8>
- Chalik, A. (2016). Elite Lokal Yang Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur. *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 23(2), 364.
<https://doi.org/10.19105/karsa.v23i2.744>
- El Adawiyah, S., Hubeis, A. V., Sumarti, T., & Susanto, D. (2019). STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PEREMPUAN DALAM MERAHAI KEPEMIMPINAN DAERAH. *Metacommunication: Journal of Communication Studies*.
<https://doi.org/10.20527/mc.v4i1.6356>
- Fahmi, M. H. (2020). KOMUNIKASI SYNCHRONOUS DAN ASYNCHRONOUS DALAM E-LEARNING PADA MASA PANDEMIC COVID-19. *Jurnal Nomosleca*.
<https://doi.org/10.26905/nomosleca.v6i2.4947>
- Hasan, N. (2015). Agama Dan Kekuasaan Politik Negara. *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 22(2), 260.
<https://doi.org/10.19105/karsa.v22i2.532>
- HS, M. A., Parninsih, I., & Hidayat, M. R. (2021). The Dakwah Movement of Kiai Muda in Eastern Indonesia: Study of Islamic Application and Islamization Models of As'adiyah. *Dialog*, 44(2), 139–151.
<https://doi.org/10.47655/dialog.v44i2.491>
- Husyein, S. (2015). Antropologi Jilboob: Politik Identitas, Life Style, dan Syari'ah. *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*.
- Kontselasi, D., & Lokal, P. (n.d.). *Rasionalisasi dan redefinisi kepemimpinan perempuan dalam kontselasi politik lokal. 1*.
- Menchik, J. (2019). Muslim Moderates and Democratic Breakdown in Indonesia Forthcoming, *Asian Studies Review*.
<https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1627286>
- Natar, A. N. (2019). Perempuan Dalam Kepemimpinan Agama: Pengalaman Kristen. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*.
<https://doi.org/10.14421/musawa.2019.182.133-147>

- Nurul Aula, S. K. (2020). Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 3(1), 125. <https://doi.org/10.14421/lijid.v3i1.2224>
- Pribadi, Y. (2018). Islam and santri culture in Madura. In *Islam, State and Society in Indonesia*. <https://doi.org/10.4324/9781315473697-2>
- Siswati, E. (2018). ANATOMI TEORI HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI. *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 5(1). <https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>
- Thohir, A., Supriadi, D., Mulyana, Arifin, F., & Septiadi, M. A. (2021). The Struggle Of Freemasonry And Islamic Ideology In The Twentieth Century During Colonialization In Indonesia. *Heliyon*, 7(10). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08237>
- Turmudi, E. (2006). Struggling for the Umma : Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java. In *Struggling for the Umma : Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java*. https://doi.org/10.26530/oopen_459752
- Yudiantiasa, M. (2020). Wajah Islam Pasca Pemilihan Presiden 2019: Demokrasi dan Tantangan Dialog. *Dialog*, 43(2), 265–274. <https://doi.org/https://doi.org/10.47655/dialog.v43i2.373>
- Zamroni, M. I. (2018). AGAMA, ETNIS DAN POLITIK DALAM PANGGUNG KEKUASAAN: Dinamika Politik Tauke Dan Kiai Di Madura. *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 10(1), 13. <https://doi.org/10.18860/el.v10i1.459>